

ABSTRAK

Panji Maulana Putra (01656180121)

PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (HT-*el*).

(ix+101 halaman; 1 Lampiran)

Perkembangan jaman era digital atau era 4.0 (*four point O*), pembebanan Hak Tanggungan dilakukan secara digital sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan Hak Tanggungan terintergrasi secara elektronik. Dicabutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan Hak Tanggungan Terintergrasi secara elektronik berlaku efektif di seluruh Indonesia tanggal 08 Juli 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau hukum normatif, penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal, dan kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. menggunakan pendekatan Undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam pembebanan Hak Tanggungan secara elektronik mengenai pembuatan akta otentik seperti perjanjian kredit dan SKMHT dan melakukan kewenangan lainnya *legalisasi* atau *Waarmeking* perjanjian dibawah tangan sedangkan peran PPAT melaksanakan pembebanan Hak Tanggungan dengan membuat akta otentik yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan melakukan permohonan pendaftaran sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 tahun 2020 Permohonan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan dengan cara online melalui situs BPN mitra.atrbpn.go.id dengan mengunggah data-data atau dokumen-dokumen yang diminta sebagai persyaratan pendaftaran Hak Tanggungan. Untuk membebaskan HT-*el* notaris tidak menghadapi kendala sedangkan PPAT menghadapi kendala dikarenakan data-data atau dokumen persyaratan tidak lengkap.

Referensi : 31 (2002-2020).

Kata Kunci : Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Hak Tanggungan

ABSTRACT

Panji Maulana Putra (01656180121)

THE ROLES OF NOTARY AND PUBLIC LAND DEED AUTHORITY (PPAT) ON IMPOSING MORTGAGE RIGHT ELECTRONICALLY (HT-el)

(ix+101 pages, 1 Appendix)

The Development on digital era 4.0, Imposing on Mortgage right are done digitally, so the issuance of the ministerial regulation of The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning No 9 on 2019 about Electronically Integrated Mortgage Right Service. The repeal of the ministerial regulation of The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning no 9 on 2019 has been replaced by ministerial regulation of The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning No 5 on 2020 about Electronically Integrated Mortgage Right Service, effectively imposed throughout Indonesia on July, 8th 2020. The Research using juridical normative or normative law, these research used secondary data as base data and then using primary data or field data. Secondary data are primary legal material, secondary and tertiary. Using statute approach and conceptual approach then to be analyze with qualitative method. The result of the research that the roles of notary on imposing mortgage right electronically, are on authentic deed creation like Credit Agreement and power of attorney imposition of mortgage right (SKMHT), other authority such as Legalization and *Waarmeking* of Underhanded deed, whereas Public Land Deed Authority (PPAT) roles on imposing mortgage right are on authentic deed creation like mortgage right allotment deed (APHT) and submit registration of mortgage right, after the introduction of ministerial regulation of The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning No. 5 on 2020, are done to National Land Agency via Online on mitra.atrbpn.go.id by uploading required data or documents as requirement for registration on mortgage right. On imposing mortgage right (HT-el) Notary are having no issue, on the contrary Public Land Deed Authority (PPAT) are facing issues because incompleteness of the required data and documents.

Reference : 31 (2002-2020)

Keyword : Notary, Public Land Deed Authority (PPAT), Mortgage Right